



# JURNAL ILMIAH PADMA SRI KRESHNA

**MASYARAKAT AGRARIS SEBAGAI TUMBAL NEGARA?**

Djaja Hendra

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA  
DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKALONGAN**

Dwi Edi Wibowo

**PELUANG DAN TANTANGAN KPID DIY 2010 - 2013**

Hartanto

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN**

(Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I.Y)

Indriyati dan Nugrahani

**REALITAS SOSIAL RESISTENSI KOMUNITAS MARGINAL**

(Studi Kasus Pemberdayaan Pemulung di Kota Surabaya)

Ita Kusuma Mahendrawati

**KUALITAS LAYANAN DI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA MENURUT  
MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA**

Jumadi

**STRATEGI MEMPERLUAS PEMASARAN MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK  
PERIKANAN**

Kristiana Sri Utami

**KRAPYAK, SISI LAIN PENDIDIKAN ALTERNATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN  
ZAMAN DARI YOGYAKARTA**

Puji Qomariyah

**PENGARUH KEBERADAAN *INSIDER TRADING* TERHADAP KEMAMPUAN RAMALAN  
ANALIS : REVISI DAN PERUBAHAN LABA**

Retno Ika Sundari

**PENGEMBANGAN MODEL *IDENTICAL DELIVERY QUANTITY* (IDQ) DALAM MANAJEMEN  
INVENTORI DENGAN PEMBAYARAN TERTUNDA BERBASIS MODEL TAHUNAN**

Sri Sukarni Puji Astuti

Padma Sri Kreshna	Vol. 1	No. 15	Yogyakarta Mei 2013	ISSN : 1411 - 8114
-------------------	--------	--------	------------------------	-----------------------



**PADMA SRI KRESHNA UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA  
DEWAN REDAKSI**

**Pelindung : Sri Sultan Hamengku Buwono X**  
**Penasehat : Rektor UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA**  
**Wakil Rektor I**  
**Wakil Rektor II**

**Pemimpin Redaksi : Oktiva Anggraini SIP., M.Si.**  
**Sekretaris Redaksi : Masrul Indrayana ST., M.T.**  
**Dewan Penyunting : Dra. Hj. Nurul Ropikoh M.Si.**  
**Dr. Djaja Hendra, M.Si.**  
**Bakri Denin BE., SH., M.H.**  
**Ir. Pujiasih M.Si.**  
**Drs. Sukirman M.Sn.**  
**Ir. Made Suladra , M.P.**

**Mitra Bestari : Dr. Junaidi**

**Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna** diterbitkan dua kali dalam setahun. Diterbitkannya jurnal ini bertujuan untuk menyalurkan pemahaman tentang aspek-aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Naskah yang dimuat merupakan karya ilmiah hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka, resensi serta gagasan orisinal lainnya yang kritis dan segar. Redaksi mengundang masyarakat akademis untuk menulis dalam jurnal ini, dengan format seperti tercantum dalam halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk disunting dan dievaluasi untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

**Alamat Redaksi:**

**Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 telpon (0274) 374352**  
**e-mail: [oktivabiyan@yahoo.co.id](mailto:oktivabiyan@yahoo.co.id)**



Publikasi ilmiah merupakan suatu bentuk komunikasi ilmiah untuk menyampaikan ide, gagasan, sanggahan dan penemuan ilmiah dalam ilmu pengetahuan agar dapat disharing yang dilakukan secara tertulis dan sistematis. Sebagai wadah komunikasi ilmiah, Jurnal Padma Sri Kreshna kembali mempublikasikan makalah ilmiah hasil penelitian dan kajian-kajian ilmiah dari berbagai bidang ilmu. Dalam edisi no. 15 Mei vol.1 Mei 2013 kali ini menampilkan sepuluh tulisan. Artikel Djaja Hendra mengawalinya dengan mengangkat judul: Masyarakat Agraris sebagai Tumbal Negara?. Selanjutnya, penulis Dwi Edi Wibowo mengkaji tentang Penegakan Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Kota dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen di Kota Pekalongan. Sedangkan persoalan Peluang dan Tantangan KPID DIY 2010-2013 dibahas Hartanto dalam tulisan berikutnya. Edisi ini turut menampilkan karya Jumadi tentang Kualitas Layanan di Universitas Widya Mataram (UWMY) menurut Mahasiswa UWMY.

Tulisan berikutnya merupakan hasil penelitian Ita Kusuma Mahendrawati tentang Realitas Sosial Resistensi Komunitas Marginal (Studi kasus pemberdayaan pemulung di kota Surabaya). Sedangkan penulis yang lain Indriyati dan Nugrahani tertarik mengkaji Strategi Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan perempuan. Kristiana Sri Utami membahas tentang Strategi memperluas pemasaran melalui pengembangan produk Perikanan. Pengaruh keberadaan insider trading terhadap kemampuan ramalan analisis: Revisi dan Perubahan Laba menjadi perhatian penulis Retno Ika Sundari, dirangkai dengan tulisan Puji Qomariah tentang Krapyak, Sisi Lain Pendidikan Alternatif dalam Menjawab Tantangan Zaman dari Yogyakarta. Sebagai penulis terakhir, Sri Sukarni Puji Astuti membahas Pengembangan Model Identical Delivery Quantity (IDQ) Dalam Manajemen Inventori dengan Pembayaran Tertunda Berbasis Model Tahunan.

Besar harapan, sajian Jurnal Padma Sri Kreshna edisi ini dapat menjadi wadah bertukar informasi dan menambah wawasan bagi para peneliti dan penulis.

Redaksi



# DAFTAR ISI

JURNAL ILMIAH PADMA SRI KRESHNA

Vol. 1 No. 15 Mei 2013

<i>Djaja Hendra</i>	1 - 8	Masyarakat Agraris Sebagai Tumbal Negara?
<i>Dwi Edi Wibowo</i>	9 - 18	Penegakan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Kota Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen
<i>Hartanto</i>	19 - 26	Peluang dan Tantangan KPID DIY 2010 - 2013
<i>Indriyanti dan Nugrahani</i>	27 - 41	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I.Y)
<i>Ita Kusuma Mahendrawati</i>	42 - 56	Realitas Sosial Resistensi Komunitas Marginal (Studi Kasus Pemberdayaan Pemulung di Kota Surabaya)
<i>Jumadi</i>	57 - 68	Kualitas Layanan di Universitas Widya Mataram Yogyakarta Menurut Mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta
<i>Kristiana Sri Utami</i>	69 - 76	Strategi Memperluas Pemasaran Melalui Pengembangan Produk Perikanan
<i>Puji Qomariyah</i>	77 - 91	Krapyak, Sisi Lain Pendidikan Alternatif Dalam Menjawab Tantangan Zaman Dari Yogyakarta
<i>Retno Ika Sundari</i>	92 - 105	
<i>Sri Sukarni Puji Astuti</i>	106 - 109	Pengaruh Keberadaan <i>Insider Trading</i> Terhadap Kemampuan Ramalan Analisis : Revisi dan Perubahan Laba



## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I. Y)

Indriyati<sup>1</sup> dan Nugrahani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Universitas PGRI Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Universitas PGRI Yogyakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perempuan ditinjau dari sosial, budaya, psikologis dan ekonomi dan mengevaluasi model pemberdayaan masyarakat miskin yang berwawasan gender.

Jenis penelitian ini secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif dengan menggunakan subyek penelitian penduduk miskin di Kabupaten Sleman tepatnya di kecamatan Cangkringan. Pengumpulan data menggunakan survei dan tanya jawab secara langsung kepada responden, dan dianalisis dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Cangkringan menggunakan beberapa kelompok usaha, namun tidak semuanya bertahan dan berproduksi untuk menjalankan usahanya. Keterbatasan sumber dana dan kurangnya pendampingan serta tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pengguna dana menyebabkan warga berinisiatif membentuk cara pemberdayaan sendiri dengan mengambil sebagian sisa dari raskin yang dijual ke masyarakat, selebihnya dari dana sisa yang terkumpul dijadikan modal usaha. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan dengan program yang telah ada dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Strategi Kemiskinan

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama di negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multidimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, dan ekologis, serta faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, terlebih dengan telah dinaikkannya harga BBM beberapa waktu yang lalu. Tidak dapat dipungkiri sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih

banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek yaitu sosial, budaya dan ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Rupanya usaha peningkatan potensi perempuan di Indonesia masih harus mendapat perhatian.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berwawasan gender peran perempuan perlu diperhatikan, yaitu dengan usaha peningkatan potensi perempuan. Saat ini Indonesia akan memasuki era liberalisasi pada tahun 2020 mendatang. Globalisasi membawa



dampak baik positif maupun negatif bagi negara, dan masyarakat. Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai dalam meningkatkan kekuatan negara yaitu yang kuat berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, sedangkan yang lemah dan masih tertinggal harus diperbesar keperdayaannya.

Dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif, peranan modal sosial semakin penting untuk kesuksesan suatu masyarakat. Oleh karena itu adanya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan merupakan syarat utama guna menjalin kerja sama dalam pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Kesetaraan peran tersebut juga merupakan jaminan sosial bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pembangunan.

Dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 411.4/0195 tanggal 23 Januari 2002 perihal Pengarusutamaan Gender. Surat Edaran tersebut menginstruksikan kepada seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi DIY untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap program kegiatannya. Di samping itu berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY, telah dibentuk Seksi Peranan Wanita pada sub Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Propinsi D. I. Yogyakarta. Dalam program pelaksanaan pembangunan berperspektif gender tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender DIY.

Dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat perlu melibatkan partisipasi perempuan untuk membuka tumbuh kembangnya industri kecil yang mengolah produk - produk berbasis hasil pertanian dan hortikultura serta potensi alam lainnya. Dengan demikian upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi perempuan, yang selanjutnya akan meningkatkan status sosial perempuan.

Untuk meningkatkan status perempuan baik sebagai pribadi maupun kelompok perlu dimunculkan daya/kekuatannya. Perempuan sebagai pribadi maupun sebagai kelompok mempunyai daya/kekuatan khusus yang terpendam karena mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal menentukan hidupnya, mengambil keputusan, mendapatkan informasi, dan



sebagainya. Untuk meningkatkan status perlu adanya model pemberdayaan yang dapat menyadarkan perempuan dan dapat menggali potensi yang ada pada perempuan baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Pada akhirnya pembangunan ekonomi berwawasan gender akan tercapai, melalui pemberdayaan perempuan di segala bidang.

Kecamatan Cangkringan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak. Kecamatan Cangkringan mempunyai 5 desa, terdiri dari 73 dusun, dengan jumlah penduduk 27918 (laki-laki : 1328, perempuan : 14290), dan dari jumlah tersebut yang berpenduduk miskin ada 3117 KK (Bapeda Sleman, 2009). Dengan melihat data tersebut, maka tampak bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, dan karena dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit saat ini, masyarakat khususnya perempuan perlu mendapatkan pencerahan dalam upaya meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan.

Dari latar belakang tersebut di atas pentingnya pengkajian lebih jauh apa yang telah dilaksanakan Pemda Sleman, khususnya di Kecamatan Cangkringan tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Bagaimana program pengembangan potensi perempuan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya bagi

masyarakat miskin? Apakah model pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman sudah berwawasan gender? Bagaimana pelaksanaan pembangunan berperspektif gender yang tepat, agar dapat menanggulangi kemiskinan?

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kemiskinan dan Permasalahannya**

Masalah kemiskinan menyangkut hak-hak dasar masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki ( Bappenas, 2005 : 15).

Banyak konsep-konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Padahal terbukti bahwa keberhasilan negara-negara industri maju terjadi karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu maka perlu merefleksikan kembali bagaimana mengatasi



Masalah kemiskinan menyangkut hak-hak dasar masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki ( Bappenas, 2005 : 15).

Banyak konsep-konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Padahal terbukti bahwa keberhasilan negara-negara industri maju terjadi karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu maka perlu merefleksikan kembali bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi khususnya bagi masyarakat miskin yang semakin jauh dari kesejahteraan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah meletakkan strategi pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan karena perempuan merupakan insan yang sangat rentan menjadi korban kemiskinan.

Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi. Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian memberdayakan perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin di pedesaan dihadapkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 ha, banyaknya rumah tangga yang tidak mempunyai aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja dan belum tercukupinya pelayanan publik. Di samping lemahnya kelembagaan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan produk yang dihasilkan. Berbagai persoalan agraria dan pertanian mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan petani/buruh



tani. Macetnya agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan membuat petani/buruh tani semakin tidak berdaya. Dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kerakyatan dan pertumbuhan yang tidak merata menimbulkan berbagai dampak sosial yaitu tingginya tingkat kemiskinan (Maswita Djaya, 2006: 6).

Menurut A. Nunuk Prasetyo Murniati (2004 :7) ada beberapa faktor yang mempengaruhi meluasnya kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat:

- a. Kepemilikan lahan: petani hanya memiliki lahan sempit yakni 0,2 ha bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali, maka mereka tidak mempunyai lahan garapan.
- b. Akses dan kontrol petani pada faktor-faktor produksi: petani mempunyai keterbatasan mengakses tanah, air, modal, teknologi, dan informasi.
- c. Penguasaan pasar: petani tidak mempunyai informasi mengenai pasar atau alternatif-alternatif produksi dan pasar yang ada.
- d. Ketiadaan jaminan usaha di sektor pertanian. Ketika tanaman padi diserang hama atau terjadi over produksi petani dipastikan mengalami kerugian.

Jika kondisi kemiskinan tersebut tidak segera diatasi, maka akan

membawa akibat pada petani/ buruh tani yang sangat kompleks, antara lain adalah:

- a. Dampak sosial akan terwujud dengan meningkatnya urbanisasi ke kota-kota besar dan bekerja di luar negeri. Akibatnya sektor pertanian terabaikan.
- b. Dampak ekonomi akan terwujud dengan berubahnya peran petani dari produsen menjadi konsumen. Petani membeli semua kebutuhannya: bibit, pupuk, obat-obat anti hama. Peran konsumen tersebut membuat petani tergantung pada pabrik, kredit usaha tani maupun rentenir. Rendahnya penghasilan makin menjauhkan petani untuk dapat mengakses pendidikan dan kesehatan.
- c. Dampak politik akan terwujud yaitu petani menjadi obyek berbagai organisasi politik yang mengatasnamakan mereka tetapi sebenarnya justru membuat petani makin terpuruk. Pertanian yang berorientasi pada pertumbuhan (developmentalisme) dipertentangkan dengan pertanian tradisional untuk menghilangkan pertanian yang berbasis masyarakat dan kearifan budaya lokal.

## 2. Issu Gender dalam Pembangunan.

Dalam satu dasa warsa terakhir, kita menyaksikan suatu



proses perubahan paradigma setelah melalui perdebatan panjang dalam pemikiran gerakan feminisme, yakni antara pemikiran yang lebih memusatkan perhatian kepada masalah perempuan berhadapan dengan system dan struktur masyarakat yang ditandaskan kepada analisis hubungan gender (Fakih dalam Julia, 1996: v).

Istilah gender dapat dimengerti sebagai manusia dilahirkan dan dididik sebagai mana perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi laki-laki seutuhnya mereka dididik bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki. Akibatnya mereka mempunyai identitas peranan gender dan bukan identitas pribadinya (AP.Murniati, Nunuk;1996) Ketimpangan dan ketidakadilan gender ini terjadi disegala bidang yaitu dalam negara, masyarakat, keluarga, lembaga kerja dan dalam diri sendiri. Manifestasi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat berwawasan gender perlu partisipasi masyarakat.

Partisipasi perempuan yang sebenarnya adalah perempuan mendapatkan kesempatan menggunakan pandangannya, pengetahuannya, dan dapat mengambil keputusan yang

berdampak khususnya pada kehidupan perempuan itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mengantisipasi adanya ketimpangan gender dalam gerakan pembangunan, maka strategi yang tepat perlu untuk dimasyarakatkan. Ada berbagai strategi yang kita kenal sebagai metode pengembangan masyarakat yang diterapkan dari segi isi dan pesan-pesan yang disampaikan dan tujuan yang akan dicapai dari setiap proses pengembangan masyarakat, dan selalu dikaitkan dengan program pengarasutamaan gender.

Dalam dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan fenomena luar biasa, bagaimana sebuah gagasan mendominasi dan mempengaruhi pemikiran secara global, khususnya di dunia ketiga, gagasan tersebut adalah "development" yang nyaris menjadi agama baru istilah *development* tersebar dan dipergunakan sebagai visi teori dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara khususnya di dunia ketiga (Mansour Fakih, 1996: 26).

Diletakkannya pengetahuan WID dalam diskurs pembangunan adalah suatu *privileged* dan bukan karena keadaan nyata akibat proses *underdevelopment* tetapi sekedar untuk mengkonseptualkan dan mengidentifikasi sehingga membuat dunia ketiga tergantung pada dunia pertama (Fakih, 2001 : 1164). Hal tersebut menjadi strategi untuk



melanggengkan dominasi kapitalisme selain itu konsep ini juga memfokuskan pokok permasalahan pada upaya memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan adalah memposisikan perempuan sebagai subyek pembangunan.

Dengan analisis gender memungkinkan suatu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender yang setara. Akibat bias gender yang tersembunyi pada pelaksanaan pembangunan maka banyak perempuan menjadikan korban dari pembangunan, bias gender dalam pembangunan sulit untuk mengubahnya, karena pada umumnya tidak disadari oleh pelaku/para perencana pembangunan.

### 3. Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak

seimbangan hak dan kewajiban.

Pemberdayaan perempuan miskin merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbatasan. Dengan kata lain pemberdayaan perempuan adalah memampukan dan memandirikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat.

Upaya memberdayakan perempuan harus pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang dengan bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Apabila perempuan mampu meningkatkan potensinya, maka perempuan akan semakin mempunyai rasa percaya diri. Hal ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dalam membangun kerjasama. Modal sosial pada dasarnya bersumber dari rasa percaya diri (*trust*) pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi sosial, melalui pelatihan-pelatihan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan perempuan akan memberikan jaminan sosial bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pembangunan.

Dalam upaya memberdayakan perempuan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : *Pertama*



menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengenalan bahwa perempuan sebagai manusia, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran perempuan akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

*Kedua* memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan (*empowering*). Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah konkrit, yaitu pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat perempuan menjadi berdaya. Untuk pelaksanaan pemberdayaan bagi perempuan, upaya program pembangunan yang amat mendesak adalah :

1. Peningkatan akses pendidikan murah dan peningkatan keterampilan bagi perempuan.
2. Pemberian akses perempuan dalam pengambilan keputusan pada pembangunan
3. Pemberian akses pelayanan kesehatan yang murah
4. Pemberian akses peluang kerja dan pasar bagi perempuan, sebagai upaya mengembangkan eksistensi dirinya.
5. Pembukaan akses teknologi dan informasi.
6. Pembukaan akses ke dalam

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal usaha /modal kerja.

7. Pengorganisasian yang cukup kuat di masyarakat (termasuk di dalamnya adalah perempuan)
8. Pengakuan, penghargaan peran dan keterlibatan perempuan
9. Ketersediaan air bersih.

*Ketiga* memberdayakan perempuan mengandung pengertian melindungi. Dalam proses pemberdayaan perempuan, harus dicegah hal-hal yang mengandung penindasan, dan ketergantungan. Namun perlindungan dan pemihakan terhadap perempuan lebih ditekankan dalam pengertian perempuan terbebas dari keterbelakangan, kekerasan, dan rasa takut dalam menyuarakan hak-haknya dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan. Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan akhir memandirikan perempuan, membangun potensi diri untuk memajukan diri kearah yang lebih baik dan setara dalam kehidupan bersama. Dengan demikian perempuan sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan, serta perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti



dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi perempuan. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh perempuan. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh perempuan sendiri, dan pemerintah sebagai fasilitator.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif dimaksudkan untuk menggambarkan: *skill* dan *knowledge* tentang penanganan *gender relationship* dari lembaga, mengetahui bentuk dan dinamika jejaring instansi, dan menentukan metode yang tepat dari instansi pemerintah untuk pemberdayaan perempuan. Pada intinya jenis penelitian kualitatif dengan serangkaian prosedurnya digunakan untuk memperdalam informasi tentang dinamika jejaring antar instansi dalam program pengentasan kemiskinan.

#### 2. Lokasi Penelitian :

Kecamatan Cangkringan

dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Sleman yang memiliki 5 desa, yang terdiri dari 73 dusun dengan jumlah penduduk 28.884 orang terdiri laki-laki sejumlah 14.112 orang, dan perempuan 14.772 orang, dari jumlah tersebut terdapat 8.727 KK, dan penduduk miskin 3.117 KK (Data Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2010).

#### 3. Teknik Pemilihan Sumber Data

Penelitian mengambil beberapa lembaga sebagai unit analisis, yang dirasa dapat mewakili proses pelayanan bagi pengentasan kemiskinan dari: Bappeda Sleman, dari Pejabat struktural di Kecamatan Cangkringan yang terkait, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perempuan dan USEP di Kecamatan Cangkringan, dan dari KK miskin khususnya perempuan yang pernah mendapatkan pelayanan program pengentasan kemiskinan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen pelbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Dengan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memperoleh informasi pengalaman informan dalam menangani persoalan pengentasan kemiskinan, serta dinamika kerjasama antar instansi



dalam menangani program tersebut. Dengan observasi dan dengan *Focus Group Discustion (FGD)* yang diikuti oleh instansi terkait dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa sasaran penelitian. Teknik ini sengaja digunakan untuk memperdalam, sekaligus sebagai *crosscheck* berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dianalisa dengan pendekatan induksi yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Menurut Miles dan Huberman, dengan memperhatikan beberapa dimensi dan mengikuti tahapan -

tahapan tertentu yang merupakan suatu siklus penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Data

Luas Kecamatan Cangkringan 4.799 ha, terdiri dari 5 desa yaitu: Wukirsari, Umbulharjo, Kepuharjo, Argomulyo, dan Glagaharjo. Terdapat 73 dusun, 151 RW dan 307 RT, dengan 2 desa swasembada mula, dan 3 desa IDT. Memiliki sarana perekonomian yaitu 12 Koperasi Simpan Pinjam, 1 KUD, 6 Badan Kredit, 1 Koperasi Produsen. Jumlah penduduk Cangkringan 28884 jiwa yang berdasar usia penduduk dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1. Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2010**

No	Usia	Jumlah	
	0 - 6 tahun	2.689	orang
	7 - 12 tahun	2.284	orang
	13 - 18 tahun	1.953	orang
	19 - 24 tahun	1.976	orang
	25 - 55 tahun	13.838	orang
	56 - 79 tahun	6.040	orang
	80 tahun ke atas	104	orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28.884</b>	<b>orang</b>

Jumlah usaha industri wilayah kecamatan Cangkringan ada 33 unit yang terdiri industri kecil 12 unit dengan tenaga kerja 63 orang,

industri RT 19 unit dengan tenaga kerja 19 orang, dan industri sedang 2 unit dengan tenaga kerja 7 orang. Berikut tabel 2 rincian sektor usaha:

**Tabel 2. Sektor Usaha**

No	Jenis Usaha	Jumlah Industri	Jumlah tenaga Kerja
1	Industri kecil	12 unit	63 orang
2	Rumah tangga	19 unit	19 orang
3	Sedang	2 unit	7 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>33 unit</b>	<b>89 orang</b>



Berdasar kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga miskin (UPPKS) dapat ditunjukkan seluruh lokasi terdapat jenis kegiatan

yang bervariasi di tiap kelompok yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin (UPPKS)**

**Tabel 1. Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2010**

No	Lokasi	Kelompok	Jenis Kegiatan
1	Wukirsari	Pokmaskin	Jual sembako
2	Gayamharjo	Argoputro	Pengolahan kripik tempe
3	Kebur, Argo	Cempaka Sari	Ampyang, stik, telur asin, warung, dll
4	Mudal, Argo	Teratai	Pewarungan, kripik jamur, makanan kecil, kue kering, masakan padang
5	Besalen, Glagaharjo	Mentari	Selai pisang, kripik pisang
6	Ngancar, Glagaharjo	Ngudi Makmur	Gula semut, kopi jahe, gula kelapa
7	Manggong, kepuharjo	Keladi	Simpan pinjam, emping garut, tepung garut, kembang goyang dari umbi-umbian, kripik jamur, pisang, roti tepung pisang
8	Pentingsari, kepuharjo	Pentingsari	Keripik jamur
9	Kali tengah kidul	Ngudi rejeki	Keripik tales, mentik

Kelompok UPPKS memiliki jenis kegiatan yang berbeda di setiap lokasi. Pada lokasi Wukirsari terdapat kelompok Pokmaskin (Kelompok Masyarakat Miskin) yang memiliki kegiatan menjual sembako. Sedangkan desa atau lokasi Gayam Harjo memiliki kegiatan pengolahan kripik tempe. Untuk lokasi Kebur dan Mudal memiliki kegiatan yang sama yaitu mengelola warung jajanan, demikian pula dengan lokasi dan kelompok lain yang masing-masing

Berdasar rincian penerima UPPKS menunjukkan terdapat 3 desa yang aktif dalam kegiatan UPPKS yaitu desa Glagahharjo, Wukirsari dan Argomulyo. Berdasar sumber dana APBD dengan menggunakan skala modal kecil hingga menengah mampu mengembangkan usaha secara produktif baik dari strata dasar hingga berkembang dari masing-masing kelompok yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 berikut:



**Tabel 4. Rincian penerima UPPKS**

No	Nama Desa	Jml Aggt	Strata	Skala Modal	Sumber Dana	Nama Kelompok
1	Glagaharjo	20	Dasar	Kecil	APBD	Besalen 1
		20	Dasar	Kecil	APBD	Besalen 2
		16	Dasar	Kecil	APBD	Glagah malang 2
		20	Dasar	Kecil	APBD	Ngancar 4
		20	Dasar	Kecil	APBD	Srunen
		5	Dasar	Menengah	APBD	Sumber Rejeki
2	Wukirsari	18	Dasar	Kecil	APBD	Bulaksalak 1
		24	Dasar	Kecil	APBD	Bulaksalak 2
		21	Dasar	Kecil	APBD	Duwet 2
		5	Dasar	Menengah	APBD	Karang pakis
		5	Dasar	Menengah	APBD	Pokmaskin
3	Argomulyo	19	Dasar	Kecil	APBD	Jiwan
		15	Dasar	Kecil	APBD	kauman
		24	Dasar	Kecil	APBD	Kebur Kidul
		21	Dasar	Kecil	APBD	Kuwang
		18	Dasar	Kecil	APBD	Menur
		16	Dasar	Kecil	APBD	Randusari
		20	Dasar	Kecil	APBD	Suruh
		15	Berkembang	Menengah	APBD	Teratai
		20	Berkembang	Menengah	APBD	Argoputro
		15	Dasar	Menengah	APBD	Bakalan
		18	Dasar	Menengah	APBD	Banaran 1
		19	Dasar	Kecil	APBD	Brongkol
		16	Berkembang	Menengah	APBD	Cempaka sari
		10	Dasar	Kecil	APBD	Gadingan
		16	Dasar	Kecil	APBD	Jetis

## 2. Analisis Data

Berdasar beberapa data di atas menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan yang telah

dilakukan di Kecamatan Cangkringan berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai jenis usaha yang dilakukan



oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hasil analisis data kualitatif menunjukkan tidak sepenuhnya usaha yang dilakukan oleh penduduk Cangkringan dapat berjalan sepenuhnya karena kurangnya pendampingan dari mitra, sehingga mereka yang bertahan yang masih menjalankan kegiatan usaha. Hal ini ditunjukkan Tabel 4 sektor usaha yang hanya memperkerjakan 89 orang dan dalam industri kecil.

Jenis kegiatan pembuatan jajanan seperti pembuatan ampyang dan kripik tidak sepenuhnya berjalan lancar, terutama di daerah Glagahharjo dengan tingkat strata dasar dengan skala modal menengah dan kecil kurang berkembang dengan baik.

Adapun desa Wukirsari yang terlihat cukup berkembang pada kelompok Pokmaskin pada jenis kegiatan penjualan sembako tetapi hanya terdiri 5 anggota. Sedangkan penerima UPPKS di desa Argomulyo dengan strata berkembang cukup baik dengan jumlah anggota lebih dari 10 orang dengan menggunakan skala modal menengah. Kurang berkembangnya kelompok usaha dan kurang bertahan dalam memproduksi dapat dikarenakan keterbatasan sumber dana dan kurangnya pendampingan serta tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pengguna dana.

Apabila mencermati berdasarkan observasi di lapangan, masalah kemiskinan yang ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Cangkringan tidak ada, karena secara umum warga Cangkringan cukup dari segi perekonomian sehingga dapat dikatakan indikator kemiskinan di Cangkringan tidak menunjukkan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

Namun demikian, mengingat tidak semuanya usaha berkembang di Cangkringan, maka memunculkan inisiatif warga untuk menggunakan cara pemberdayaan sendiri dengan mengambil sebagian sisa dari raskin yang dijual ke masyarakat, selebihnya dari dana sisa yang terkumpul dijadikan modal usaha. Seperti yang dilakukan warga desa Wukirsari, yang kemudian langkah tersebut dapat sebagai cara pemberdayaan yang mampu untuk diteladani oleh desa lain. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan program dari pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan yang lebih praktis dilakukan dengan partisipasi dan kesadaran warga untuk memproduksi, hal ini sudah dibuktikan oleh sebagian warga Cangkringan yang berinisiatif untuk mengumpulkan dana sebagai modal untuk memproduksi yang akhirnya dana tersebut digulirkan sesuai dengan kemampuan pengguna dana dan



dengan jangka waktu yang telah disepakati.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Cangkringan. Berdasar pengamatan dan observasi menunjukkan di wilayah Cangkringan terdapat beberapa kelompok usaha, namun tidak semuanya bertahan dan memproduksi untuk menjalankan usahanya. Keterbatasan sumber dana dan kurangnya pendampingan serta tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pengguna dana menyebabkan warga berinisiatif membentuk cara pemberdayaan sendiri dengan mengambil sebagian sisa dari raskin yang dijual ke masyarakat, selebihnya dari dana sisa yang terkumpul dijadikan modal usaha. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan dengan program yang telah ada dari pemerintah.

##### 2. Saran

Program pemerintah yang akan datang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan yang telah dilakukan desa (misalnya Wukirsari) dalam mengorganisir Pokmaskin sehingga dana dapat berkembang. Selain itu pemerintah juga melibatkan penduduk khususnya perempuan yang berusia produktif antara 25-55 tahun untuk aktif dalam usaha produktif desa, misalnya

dengan memaksimalkan kelompok dasa wisma atau PKK sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif, 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Cleves Mosse Julia, 1996, *Gender dan pembangunan* Rifka Annisa Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis gender dan transformasi sosial*, Pustaka pelajar Yogyakarta.
- Forum Komunikasi PSW DIY, 2000, *Laporan hasil Penelitian Evaluasi Program Daerah dan Non Sektoral*, Yogyakarta
- Handayani, Sih, Yos Soetiyoso, 1997, *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, Sekretaris Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) kerjasama OXFAM UK/I, Yogyakarta.
- Handayani, Trisaksi, Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan, Teori, Kebijakan, dan Penerapan*, Jakarta



Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI 2006, *Perempuan Indonesai* 2005, Jakarta

Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro, Bapenas, Jakarta.

Prasetyo Murniati A, Nunuk 1996, *Pengaruh ideologi gender terhadap relasi perempuan dan laki-laki*, makalah lepas

Pemda Prop DIY, 2003, *Laporan Pelaksana kegiatan Tim Koordinasi Pembanguann berperspektif gender*, KPP Yogyakarta

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, 1977, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Pustaka Utamna Graffiti, Jakarta.

Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan kemiskinan* Rineka Cipta, Jakarta.